



Tantangan dan Manfaat Pendekatan *Bottom Up* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kupang

**Maya Angelina Seran¹, Maria Litvina Prada Manek², Melania Bahi³,
Pascarlio Yoseph Zawa⁴, Zenadia Sousa⁵, Adrianus Ketmoen⁶,
Adelheid Elisabet Loda^{7*}**

¹⁻⁷Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: desiadlheid@gmail.com

Abstract. Sustainable development has become the main framework in global efforts to address the imbalance between economic growth, social justice, and environmental preservation. Amid global challenges such as climate change, rapid urbanization, and social inequality, the bottom-up approach has emerged as an alternative strategy that emphasizes the active participation of local communities in development planning and implementation. This study aims to identify and analyze the challenges and benefits of a bottom-up approach to sustainable development. The method used is a literature study, integrating the results of the review. The results of the study show that this approach brings significant benefits, namely increased social inclusion, encouragement of local innovation, and strengthening of environmental sustainability through community participation. These benefits are manifested in increased community ownership of programs, which encourages local adaptation initiatives, such as traditional irrigation techniques to reduce the impact of drought, as well as the implementation of organic farming programs and mangrove forest management. However, the implementation of the bottom-up approach in Kupang Regency faces substantial challenges, which are divided into resource constraints (including human and financial resources) and coordination issues. Resource constraints, such as lack of access to education and technology, can hamper program implementation.

Keywords: *Bottom Up; Community Participation; Kupang Regency; Local Innovation; Sustainable Development.*

Abstrak Pembangunan berkelanjutan telah menjadi kerangka utama dalam upaya global untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan sosial, pendekatan bottom up muncul sebagai strategi alternatif yang menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, manfaat pendekatan bottum up dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, mengintegrasikan hasil kajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini membawa manfaat signifikan, yaitu peningkatan inklusi sosial, dorongan inovasi lokal, dan penguatan keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi masyarakat. Manfaat ini terwujud dalam peningkatan rasa memiliki (ownership) masyarakat terhadap program, yang mendorong inisiatif adaptasi lokal, seperti teknik irigasi tradisional untuk mengurangi dampak kekeringan, serta implementasi program pertanian organik dan pengelolaan hutan mangrove. Namun, implementasi pendekatan bottom up di Kabupaten Kupang menghadapi tantangan substansial, yang terbagi menjadi keterbatasan sumber daya (termasuk sumber daya manusia dan finansial) dan isu koordinasi. Keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya akses pendidikan dan teknologi, dapat menghambat pelaksanaan program.

Kata Kunci: *Bottom Up; Inovasi Lokal; Kabupaten Kupang; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan.*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi kerangka utama dalam upaya global untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang semakin mendesak, ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Lubis, 2025)

Di era modern, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi pertimbangan mendasar di semua sektor. Secara tradisional, sektor ekonomi hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan. Akan tetapi, paradigma kini telah beralih dengan menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, menjadikannya tujuan utama berbagai bangsa. Dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini, industri keuangan memiliki peran yang sentral dan strategis. (Amika et al., 2024)

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan ketimpangan sosial, pendekatan bottom up muncul sebagai strategi alternatif yang menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan bottom-up memungkinkan adaptasi kebijakan sesuai konteks lokal melalui proses yang lebih fleksibel dan dinamis. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Dalam banyak studi kasus, pendekatan lokal terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik daerah seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan degradasi lingkungan. (Muminah & Suprajogo, 2025)

Berbeda dengan pendekatan top down yang bersifat sentralis dan hierarkis, *bottom up* mendorong inisiatif dari bawah, di mana masyarakat terlibat langsung untuk memastikan bahwa program pembangunan selaras dengan realitas lokal, budaya, dan kebutuhan spesifik. Memastikan bahwa program pembangunan selaras dengan realitas lokal, budaya, dan kebutuhan spesifik. Pada tingkat nasional, komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai regulasi dan program, termasuk Indonesia Green Growth Program oleh BAPPENAS. (Rany et al., 2020)

Namun, penerapan pendekatan ini tidak tanpa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas institusional, dan potensi konflik koordinasi. Di sisi lain, manfaatnya meliputi peningkatan inklusi sosial, inovasi lokal, dan keberlanjutan jangka panjang, yang terbukti efektif dalam konteks negara berkembang. Di Indonesia, sebagai negara

dengan keanekaragaman budaya dan tantangan lingkungan yang kompleks, pendekatan *bottom up* telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, tetapi penerapannya di daerah seperti Kabupaten Kupang menghadapi dinamika unik yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Meskipun mengubah sistem ekonomi yang telah established menjadi sesuai dengan prinsip berkelanjutan adalah tantangan yang kompleks, transformasi ini justru membuka jalan menuju ekonomi hijau yang menjanjikan. Langkah strategis seperti pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, penurunan emisi gas, dan konservasi keanekaragaman hayati menjadi kunci. Di sisi lain, peluang besar terletak pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, di mana kemajuan dalam energi terbarukan, penanganan sampah, pertanian berkelanjutan, dan transportasi hijau tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi jejak ekologis.

Di tingkat nasional, Indonesia telah berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan program, mencerminkan pengaruh global seperti Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pondasi utama yang mendorong desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan *bottom up* diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menekankan keterlibatan stakeholders lokal untuk mencapai target SDGs, seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 13 (Aksi Iklim). Di Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan pembangunan lebih akut karena faktor geografis seperti kepulauan yang rentan terhadap bencana alam, kekeringan, dan erosi tanah. NTT, dengan tingkat kemiskinan mencapai 14,8% pada tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), memerlukan pendekatan *bottom up* untuk mengatasi isu-isu seperti ketergantungan pada sektor pertanian subsisten dan degradasi lingkungan. Pendekatan ini telah terbukti memberikan manfaat, seperti peningkatan ketahanan masyarakat melalui inisiatif lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kurangnya akses teknologi dan koordinasi antar-pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Kupang menjadi studi kasus yang relevan, di mana pendekatan *bottom up* dapat dianalisis untuk memahami implikasinya bagi pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Kupang, sebagai salah satu wilayah prioritas di NTT, memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan namun dihadapkan pada berbagai tantangan struktural. Dengan luas wilayah sekitar 7.178 km² dan populasi sekitar 400.000 jiwa (data BPS 2023), Kabupaten Kupang merupakan pusat ekonomi di NTT dengan sektor utama pertanian,

perikanan, dan pariwisata. Namun, daerah ini rentan terhadap masalah lingkungan seperti kekeringan musiman, erosi tanah, dan pencemaran air, yang diperparah oleh kemiskinan yang mencapai 15% dari penduduk. Pendekatan *bottom up* di Kabupaten Kupang telah diterapkan melalui program seperti pengelolaan hutan mangrove, program pertanian organik, dan inisiatif adaptasi iklim yang melibatkan kelompok masyarakat lokal, seperti kelompok tani di Desa Oebelo. Manfaat pendekatan ini terlihat dalam peningkatan rasa memiliki (ownership) masyarakat, yang mendorong inovasi lokal seperti teknik irigasi tradisional untuk mengurangi dampak kekeringan, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan partisipasi sebagai kunci untuk mencapai hasil yang inklusif.

Namun, tantangan yang dihadapi cukup krusial yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana banyak masyarakat kurang akses pendidikan dan teknologi, serta isu koordinasi antara pemerintah daerah dan komunitas, yang dapat menimbulkan konflik dan keterlambatan pelaksanaan program. Faktor budaya dan sosial di Kabupaten Kupang, seperti struktur kepemimpinan adat 11budaya kolektif masyarakat dapat memperkuat partisipasi dan inovasi lokal, seperti dalam pengelolaan sumber daya bersama. Di sisi lain, perbedaan prioritas antara kelompok masyarakat dan pemerintah dapat menimbulkan tantangan koordinasi. Penelitian sebelumnya, seperti studi oleh USAID di NTT, menunjukkan bahwa *bottom up* berhasil mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, tetapi memerlukan dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat.

Pendidikan yakni salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik menjadi kunci untuk tercapainya kemajuan dan kesuksesan di masyarakat terutama di era saat ini. (Ilhami et al., 2025). Pendidikan adalah pilar fundamental bagi kemajuan sebuah bangsa. Pada masa kini, tersedianya pendidikan yang berkualitas merupakan pondasi untuk menciptakan masyarakat yang sukses dan progresif. Perubahan signifikan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi dinamika kehidupan, termasuk dalam hal cara individu menjalani hidup, berkarier, dan menuntut ilmu.

Teknologi merupakan salah satu fokus penting dalam strategi pembangunan masyarakat yang inklusif. Riset mengungkapkan bahwa meskipun digitalisasi dapat berfungsi sebagai alat kuat untuk memperluas jangkauan dan melibatkan komunitas dalam pembangunan, ia juga berisiko memicu ketimpangan struktural baru apabila implementasinya buruk. Keefektifan transformasi digital dalam konteks ini sangat ditentukan oleh tersedianya akses yang merata terhadap perangkat teknologi dan infrastruktur penunjang. Ada bahaya bahwa populasi yang

secara ekonomi dan sosial sudah rentan akan makin teralienasi di zaman digital, yang pada akhirnya memperdalam kesenjangan yang sudah terjadi. (Amika et al., 2024)

Dalam konteks global, pendekatan ini selaras dengan inisiatif seperti Paris Agreement, yang menekankan peran lokal dalam mitigasi iklim. Oleh karena itu, memahami tantangan dan manfaat pendekatan *bottom up* di Kabupaten Kupang tidak hanya penting untuk pembangunan daerah ini, tetapi juga sebagai model bagi daerah lain di Indonesia timur. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek-aspek tersebut secara mendalam, guna memberikan rekomendasi yang dapat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih efektif.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dengan membentuk komunitas yang mandiri, berpengetahuan, dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material, finansial, maupun sosial. Melalui proses ini, diharapkan tumbuh keyakinan diri, kemampuan berinisiatif, sumber pendapatan yang berkelanjutan, partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta kemandirian dalam menjalani kehidupan. (Yani & Wahyuni, 2024)

Esensi dari pemberdayaan masyarakat tidak terbatas pada alih kuasa kepada individu atau kelompok, melainkan juga mencakup penguatan kapabilitas, pemahaman, dan keahlian, disertai perluasan akses kepada sumber daya dan keadilan sosial. Berdasarkan pemahaman ini, artikel ini akan mengkaji dinamika pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan desa melalui studi kasus pada sebuah program yang bersifat partisipatif. (Siregar, 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Konsep ini berangkat dari prinsip pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Lubis, 2025). Dalam perkembangannya, pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendesak akibat meningkatnya dampak perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial.

Secara ekonomi, paradigma pembangunan telah bergeser dari orientasi pertumbuhan semata menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Industri keuangan dan kebijakan ekonomi kini dituntut untuk tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan lingkungan (Amika et al., 2024). Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai proses transformasi struktural menuju ekonomi hijau yang

menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Pendekatan Bottom-Up dalam Pembangunan

Pendekatan bottom-up merupakan strategi pembangunan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan top-down yang bersifat sentralistik dan hierarkis, pendekatan bottom-up mendorong inisiatif dari tingkat akar rumput agar kebijakan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal (Muminah & Suprajogo, 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola pembangunan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara partisipatif cenderung lebih efektif dalam mengatasi persoalan spesifik daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan degradasi lingkungan (Muminah & Suprajogo, 2025). Fleksibilitas dan adaptasi lokal menjadi keunggulan utama pendekatan bottom-up, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *adaptive implementation* yang menekankan pentingnya diskresi pelaksana di tingkat lokal.

Pembangunan Berkelanjutan dan Kebijakan di Indonesia

Di tingkat nasional, komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai regulasi dan program, yang dipengaruhi oleh Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sustainable Development Goals (SDGs). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mendorong partisipasi masyarakat dan desentralisasi pembangunan.

Pendekatan bottom-up diimplementasikan melalui dokumen perencanaan seperti RPJMN dan RPJMD yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam mencapai target SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan aksi iklim (SDG 13). Program Indonesia Green Growth yang diinisiasi oleh BAPPENAS juga menegaskan pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama (Rany et al., 2020).

Pendekatan Bottom-Up dalam Konteks Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, seperti kondisi geografis kepulauan, kerentanan terhadap kekeringan, serta tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT

mencapai 14,8% pada tahun 2022, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.

Kabupaten Kupang sebagai salah satu wilayah strategis di NTT memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, namun juga dihadapkan pada persoalan lingkungan seperti erosi tanah dan pencemaran air. Pendekatan bottom-up telah diterapkan melalui berbagai program berbasis komunitas, seperti pengelolaan hutan mangrove, pertanian organik, dan adaptasi iklim yang melibatkan kelompok masyarakat lokal. Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki (ownership) masyarakat serta mendorong inovasi lokal, seperti pemanfaatan teknik irigasi tradisional untuk mengatasi kekeringan (Muminah & Suprajogo, 2025).

Namun demikian, implementasi pendekatan bottom-up di Kabupaten Kupang juga menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan partisipatif memerlukan dukungan infrastruktur dan kebijakan dari pemerintah pusat agar inisiatif lokal dapat berkelanjutan (USAID dalam Muminah & Suprajogo, 2025).

Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pilar Pendekatan Bottom-Up

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari pendekatan bottom-up dalam pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan bertujuan membentuk masyarakat yang mandiri, berpengetahuan, dan memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan (Yani & Wahyuni, 2024). Proses ini tidak hanya berfokus pada alih kewenangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap sumber daya dan keadilan sosial (Siregar, 2024).

Dalam konteks pembangunan desa, program partisipatif berbasis bottom-up terbukti mampu meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan mendorong tumbuhnya tanggung jawab kolektif dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Siregar, 2024). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (literature review). Data yang dianalisis berupa sumber-sumber sekunder dari jurnal-jurnal akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Proses penelitian diawali dengan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik, terutama yang membahas tantangan, manfaat pendekatan *bottom up* dan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Setelah itu, data dan informasi dari literatur tersebut dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi peran, tantangan, dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peran *bottom-up* dalam menangani tantangan dalam pembangunan berkelanjutan, serta memberikan strategi untuk pembangunan berkelanjutan.

Metode ini dipilih karena memungkinkan kajian mendalam dengan sumber data yang sudah ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas dan terintegrasi tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah jurnal yang relevan, pendekatan bottom-up dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kupang menunjukkan potensi yang signifikan sekaligus menghadapi tantangan yang kompleks. Implementasi pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang selaras dengan semangat otonomi daerah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Pendekatan *Bottom-Up*

Penerapan pendekatan bottom-up dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kupang menawarkan sejumlah manfaat signifikan, meskipun juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif aktor-aktor lokal, seperti masyarakat dan birokrat tingkat bawah, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menurut Muminah dan Suprajogo (2025), implementasi kebijakan yang partisipatif dan kontekstual cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan lokal karena dirumuskan berdasarkan realitas di tingkat akar rumput. Keterlibatan karyawan di garis depan dalam pengambilan keputusan (bottom-up) menghasilkan keputusan yang lebih relevan dengan kondisi operasional dan kebutuhan pasar. (Maulidha et al., 2024)

Dalam konteks Kabupaten Kupang, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam program-program seperti pengelolaan hutan mangrove atau pertanian organik yang melibatkan kelompok tani secara langsung, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) masyarakat dan memastikan keberlanjutan program. Inovasi-inovasi lokal semacam ini lahir dari interaksi langsung antara pelaksana dan masyarakat dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata. (Muminah & Suprajogo, 2025)

Manfaat lain dari pendekatan bottom-up adalah kemampuannya mendorong inovasi lokal yang adaptif. Pelaksana di tingkat lapangan, seperti kepala desa atau pejabat teknis daerah, memiliki diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial, budaya, dan geografis setempat. Muminah dan Suprajogo (2025) mencatat bahwa di daerah-daerah dengan kepemimpinan progresif dan sistem partisipatif yang mapan, pendekatan ini telah melahirkan inovasi seperti program kampung tematik dan bank sampah. Di Kabupaten Kupang, yang menghadapi tantangan kekeringan musiman, partisipasi masyarakat dapat memunculkan teknik irigasi tradisional yang efektif sebagai bentuk adaptasi lokal. Fleksibilitas ini merupakan inti dari model “adaptive implementation” yang dikemukakan oleh Berman, di mana keberhasilan kebijakan bergantung pada kemampuan adaptasi pelaksana di tingkat lokal terhadap kondisi spesifik daerahnya.

Selain itu, pendekatan bottom-up memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan, yang merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan. Program Green Growth yang diinisiasi BAPPENAS, Pentingnya integrasi prinsip lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Program-program seperti pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan lanskap berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam. (Rany et al., 2020)

Dalam konteks Kupang, pendekatan bottom-up memungkinkan komunitas lokal terlibat langsung dalam menjaga ekosistem, seperti melalui rehabilitasi hutan mangrove yang tidak hanya mencegah abrasi tetapi juga menjadi sumber mata pencarian berkelanjutan.

Sinergi Bottom-Up dan Top-Down

Pendekatan *bottom-up* tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kupang. Diperlukan sinergi yang kuat dengan elemen top-down untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Seperti ditunjukkan dalam penelitian (Maulidha et al., 2024) di PT Telkomsel, kombinasi kedua pendekatan ini dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas strategis dan fleksibilitas operasional.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan, alokasi anggaran yang memadai, dan kerangka regulasi yang mendukung. Dukungan ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa inisiatif lokal dapat berkembang dan berkelanjutan. Seperti diungkapkan dalam studi *Green Growth* Program oleh (Rany et al., 2020), keberhasilan program pembangunan berkelanjutan memerlukan komitmen kuat dan desain kelembagaan yang efektif.

Dengan kata lain, optimalisasi pendekatan bottom-up di Kabupaten Kupang memerlukan integrasi yang sinergis dengan elemen top-down, dimana pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan enabler yang mendukung tumbuhnya inisiatif lokal, sekaligus memberikan kerangka kebijakan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.

Strategi Pendekatan *Bottom-Up*

Sebagai strategi kunci dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan bottom-up menekankan prinsip keswadayaan dan kemandirian dengan menjadikan warga sebagai subjek utama. (Yani & Wahyuni, 2024). Strategi ini mensyaratkan peran serta aktif komunitas dalam setiap tahap pembangunan berkelanjutan. Temuan membuktikan bahwa ketika masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan eksekusi program, hal itu akan memicu kolaborasi, mendorong inovasi, dan memunculkan kreativitas untuk memberdayakan potensi daerah secara optimal.

Lebih dari itu, metode ini juga berhasil menumbuhkan jiwa kepemilikan serta tanggung jawab kolektif guna merealisasikan target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap inisiatif pembangunan yang dijalankan dapat selaras dengan aspirasi masyarakat dan memberikan dampak yang maksimal. Tujuan akhirnya adalah membentuk komunitas yang berdaulat, yang dilengkapi dengan wawasan, kewenangan, dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada intinya, pendekatan ini adalah sebuah mekanisme pemberdayaan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki kecakapan dan pemahaman yang memadai.

Dalam konteks manajemen pendidikan, inovasi dengan pendekatan bottom-up dianggap memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh partisipasi aktif para pelaku dan pengagas sejak proses perencanaan hingga tahap implementasi. Pada tingkat sekolah, inovasi model ini lahir dari gagasan, pemikiran, daya cipta, serta prakarsa internal. Berbeda dengan model top-down yang bersifat terpusat, pendekatan bottom-up dinilai lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Kesesuaian ini muncul karena setiap individu yang terlibat memegang tanggung jawab langsung atas kesuksesan inovasi yang mereka

kembangkan bersama. Kendati demikian, meskipun menjanjikan keberlanjutan, penelitian menunjukkan bahwa penerapan inovasi semacam ini masih belum meluas di Indonesia. Faktor penghambat utamanya adalah struktur sistem pendidikan nasional yang masih didominasi oleh karakteristik sentralistik.. (Ilhami et al., 2025)

Pendekatan bottom-up menjadi kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dalam pembangunan desa. Program partisipatif pada dasarnya didasarkan pada prinsip bottom-up karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini secara khusus menekankan pentingnya memperkuat kapasitas masyarakat lokal dan mendengarkan aspirasi mereka. Dampak positif utama dari program yang berbasis partisipatif/bottom-up adalah peningkatan kemandirian masyarakat. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat desa dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengelola sumber daya lokal mereka sendiri. Proses ini pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. (Siregar, 2024)

5. KESIMPULAN

Pendekatan bottom up merupakan strategi yang efektif dan relevan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Kabupaten Kupang, khususnya dalam konteks keanekaragaman budaya dan tantangan geografis yang kompleks di NTT. Manfaat utamanya adalah meningkatkan inklusi sosial, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat keberlanjutan lingkungan melalui partisipasi aktif masyarakat.

Namun, implementasi pendekatan ini menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial serta isu koordinasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah daerah. Tantangan ini berpotensi menghambat pelaksanaan program dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pendekatan bottom up di Kabupaten Kupang, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi yang kuat dengan dukungan top down, terutama dalam hal penguatan kapasitas lokal, penyediaan akses terhadap pendidikan dan teknologi, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah, C., & Nisa, F. L. (2024). Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 199–210. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.814>
- Amika, F. Z., Sulistyowati, T., & Sulismaidi, S. (2024). Pendekatan berkeadilan dalam pembangunan masyarakat: Studi literatur komprehensif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 957–972. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12574>
- Auliya, F. N., & Nurhadi, N. (2023). Towards a sustainable green economy: Challenges and opportunities for long-term environmental and economic stability. *Pengabmas Nusantara*, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.304>
- Bottom-Up, R. P. T. (2010). Perbaikan permukiman informal di Indonesia. [Nama jurnal/penerbit tidak tersedia], 37–41.
- Da Mendez, M. R., Onang, Y., & Temu, T. J. (2025). Strategi optimalisasi pelayanan di Kelurahan Nangameting, Kabupaten Sikka melalui pendekatan manajerial. *Lebah*, 18(3), 280–288. <https://plus62.isha.or.id/index.php/abdimas/article/view/325>
- Economic, J., & Journal, E. (2025). [Judul artikel tidak tersedia]. *Economic Journal*, 7(3), 839–857.
- Ilhami, I., Samudra, A., Nurhasanah, B. A., & Jhauzal, M. T. (2025). Inovasi dalam manajemen pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas sekolah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 3(1), 11–21.
- Legi, R., Rompas, R., & Pombengi, J. (2015). Implementasi pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten. [Nama jurnal tidak tersedia], 2.
- Lestari, F., & Indrayati, I. (2022). Pengembangan kelembagaan dan pembiayaan geopark di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(2), 102–122. <https://doi.org/10.29244/jprwd.2022.6.2.102-122>
- Lubis, R. O. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan kota hijau: Studi kasus implementasi kebijakan lingkungan. [Nama jurnal tidak tersedia], 1(2), 183–190.
- Maulidha, N. S., Sari, Y. A., Wibowo, W. R., Hidayat, R., & Kusumasari, I. R. (2024). Strategi pengambilan keputusan top-down dan bottom-up di PT Telkomsel. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i2.537>
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan bottom-up. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485–1495. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253>
- Mutiani, M., Pramudito, S., Marlina, E., Muchlashin, A., & Ruslan, H. (2024). Strategi pemanfaatan bantaran sungai untuk pengembangan masyarakat berkelanjutan: Sebuah analisis sistematis. *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i1.1124>

Pangesti, D. T., Syah, N., Dewata, I., Arlian, E., & Sholichin, M. (2024). The influence of family leadership style in encouraging awareness and action on household waste management. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(Special Issue), 166–172. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10ispecialissue.7622>

Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui Indonesia green growth program oleh BAPPENAS. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 63–73.

Siregar, R. (2024). Dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa: Tinjauan kasus program partisipatif. *Literacy Notes*, 1(2), 1–11.

Yani, A., & Wahyuni, T. (2024). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendorong partisipasi. *Jurnal Transformasi*, 10(2), 201–208. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/transformasi/article/view/14203>

Zein, M. K. (2023). Pengembangan sistem transaksi pulsa berbasis Android dan web dengan menerapkan metode bottom-up untuk mendesain ulang database pada sistem software pulsa. *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence (JEISBI)*, 4(2), 42–51. <https://doi.org/10.26740/jeisbi.v4i2.51808>